



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS

Jakarta, Juni 2018



I. *WHERE ARE WE?*

II. PAKET KEBIJAKAN EKONOMI 1-15

III. KEBIJAKAN POST BORDER

IV. KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA

V. MODEL PELAYANAN PTSP DI ERA OSS



DAYA PIKAT

- Jumlah populasi dan konsumen nomor 4 di dunia dan terbesar di kawasan dengan daya beli yang kuat
- Sumber daya alam yang variatif
- Letak geografis sebagai hub logistik
- Stabilitas politik dan keamanan yang terkendali
- Sistem devisa bebas dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan



DAYA TARIK

- Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di kawasan dan G20 dengan kualitas yang baik (penurunan tingkat kemiskinan – (10,12% - Sept'17), pengangguran (5,50% - Augs'17), dan gini ratio (0,39% - Sept'17))
- Kebijakan yang cenderung terus *business friendly*.
- Peningkatan ranking EODB dari 106 pada EODB 2016, menjadi peringkat 72 pada EODB 2018 (meningkat 34 peringkat dalam 2 tahun terakhir)
- Peningkatan peringkat daya saing global menjadi posisi 36 pada tahun 2018 dari posisi 41 pada tahun 2017
- “FITCH” menaikkan peringkat Indonesia dari ‘BBB-’ menjadi ‘BBB’ per Desember 2017
- Moody’s menaikkan rating kredit Indonesia dari sebelumnya Baa3 (outlook positif) menjadi Baa2 (outlook stabil) pada April 2018



DAYA SAING

PEKERJAAN RUMAH

- Menghilangkan beban regulasi (banyak, ruwet, tidak tegas, dan tidak pasti)
- Membantu penyelesaian kasus-kasus berusaha secara tuntas
- Mempermudah perolehan lahan
- Menghilangkan premanisme *white or blue collar*
- Membangun infrastruktur yang memadai dan mengurangi biaya logistik yang tinggi
- Meningkatkan kapasitas dan produktivitas SDM
- Melakukan rasionalisasi beban pungutan pemerintah
- Membangun sistem yang mempermudah pelayanan perizinan berusaha

II. EKOSISTEM DALAM PKE 1-15 UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING

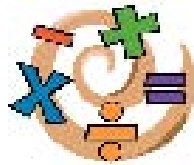
KEBIJAKAN

AKSI REGULASI



Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta pengurangan COP

Diskon tarif listrik, penurunan harga gas untuk industri tertentu, pengurangan Bunga pinjaman (KUR)



Kepastian usaha

Upah terproyeksi (PP No. 78/2015)



Logistik

Pusat Logistik Berikat (PLB)



Perluasan usaha

Perluasan KUR, Inland FTA, KEK, revitalisasi Kawasan Industri



Insentif

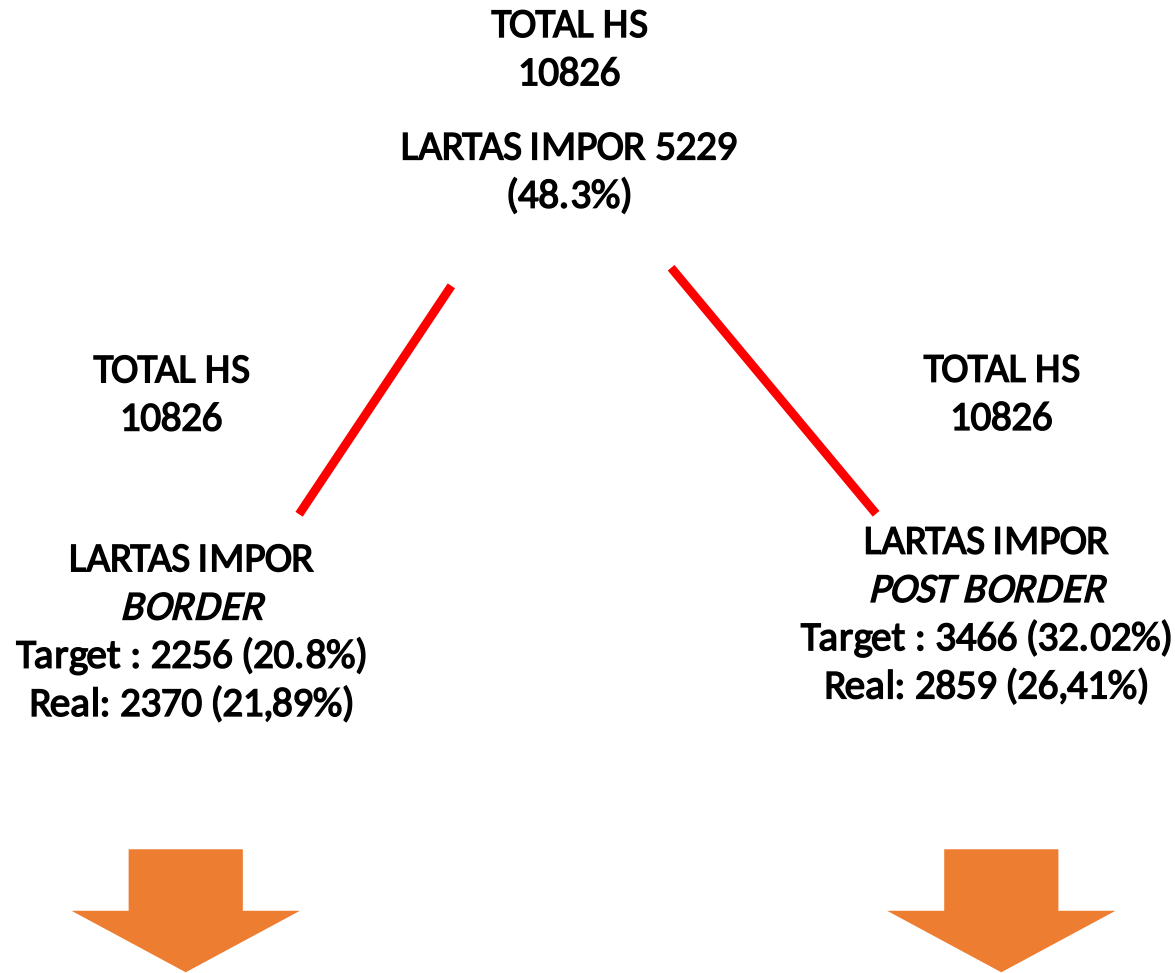
PPN, Revaluasi Aset, PPh untuk industri tertentu (alas kaki dan TPT)



Pengembangan kapasitas

Vokasi, Penguatan IKM dan Koperasi

III. KEBIJAKAN POST BORDER



Penyederhanaan tata niaga ditujukan untuk:

1. Mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, daya saing ekspor, dan efisiensi kebutuhan konsumsi.
2. Memenuhi komitmen kerjasama perdagangan internasional dimana ASEAN sudah rata-rata 17% dan komitmen WTO *Schedule XXI*.
3. Mendukung kelancaran arus barang ekspor impor di pelabuhan (*dwelling time*) yang melengkapi instrument: INSW, PLB, dan *risk management*.

Dampak:

1. Kelancaran arus barang (*Dwelling Time*) dapat turun 0,9-1,1 hari
2. Percepatan proses produksi barang ekspor

IV. KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan:

- Investasi sebesar Rp4.783 Triliun (atau dari target APBN 2018 sebesar 6,9% menjadi 7,2%)
- Ekspor sebesar Rp3.354 Triliun (atau dari target APBN 2018 sebesar 8,14% menjadi 10%)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

TAHAP 1

PEMBENTUKAN SATGAS K/L/P:

- mengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan sektor
- mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan

Penerapan komitmen penyelesaian perizinan atau pemenuhan standar (*Indicative Investment Certificate*) di KEK, FTZ, Kawasan Industri, KSPN yang telah beroperasi

Penerapan *Data Sharing* untuk perizinan

TAHAP 2

REFORMASI REGULASI di Pusat dan Daerah

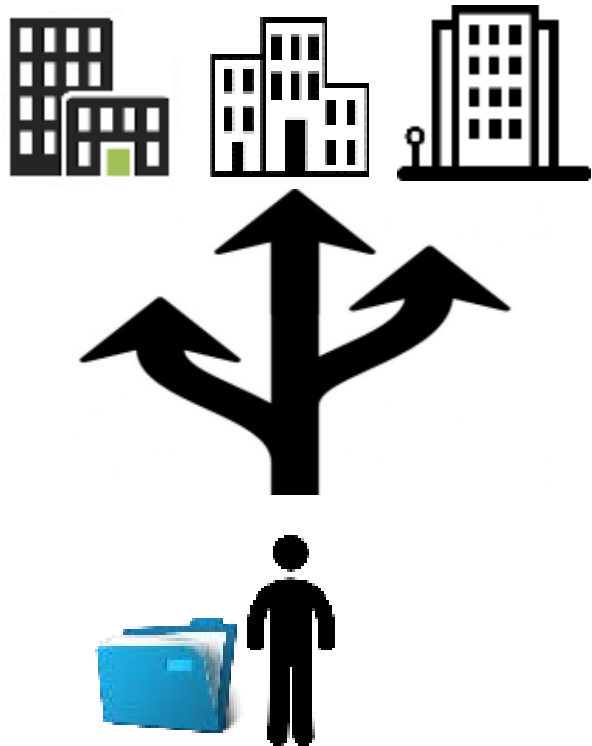
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*

Catatan: Tahap II berjalan paralel dengan Tahap I

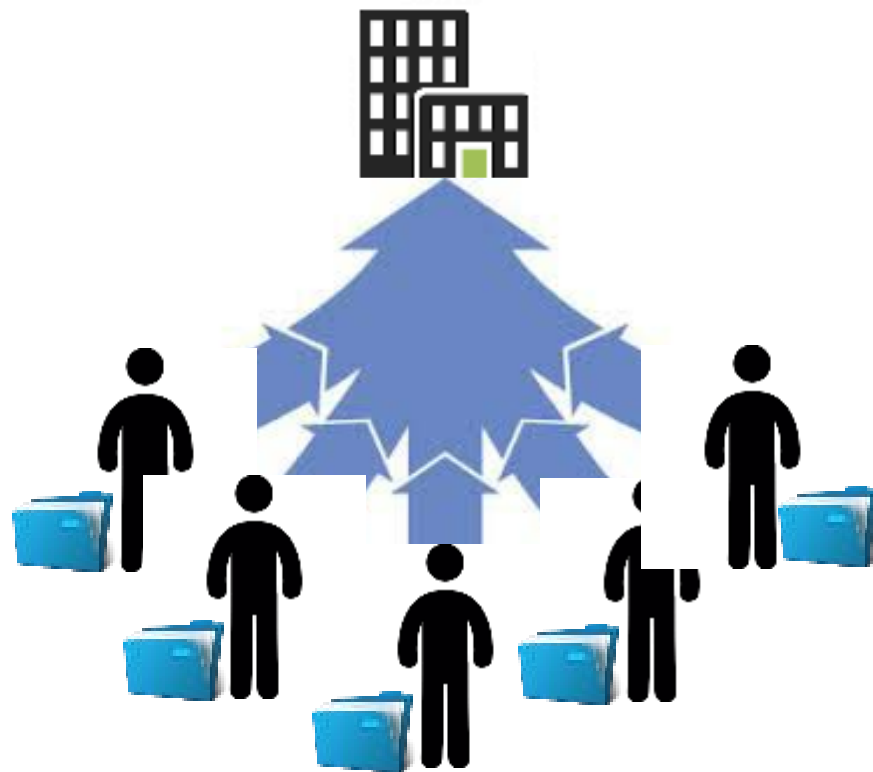
PROSES PERIZINAN BERUSAHA SAAT INI



Seorang Warga/Badan Usaha harus menuju banyak lembaga Pemerintah

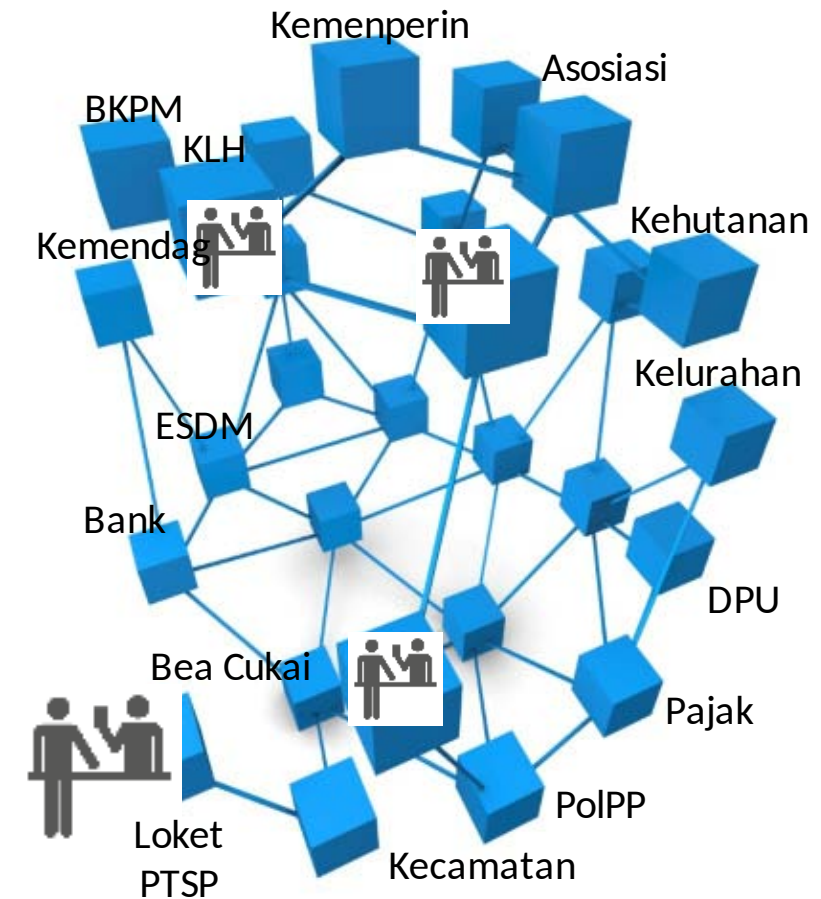


Satu Lembaga Pemerintah harus melayani banyak warga/badan usaha

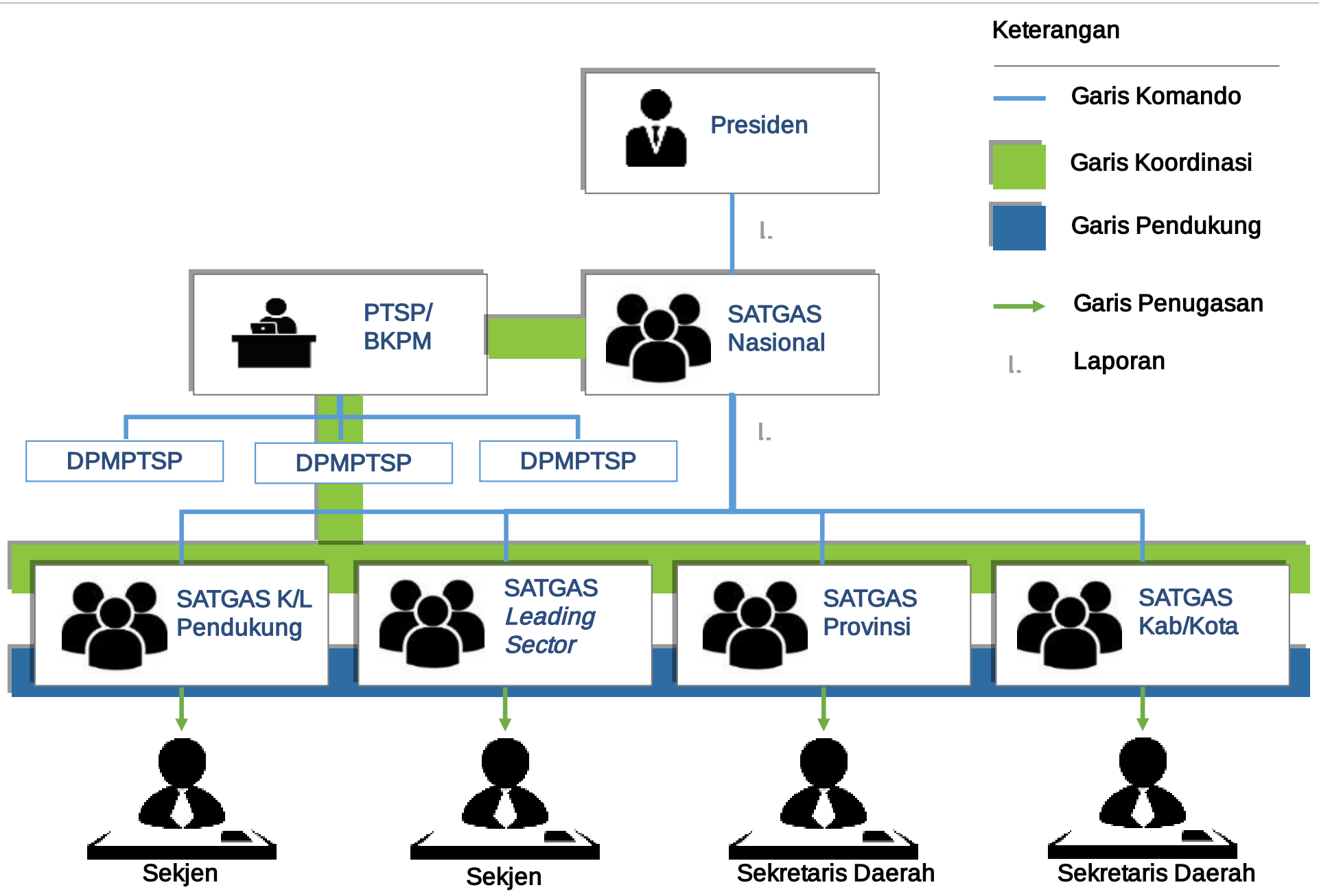


“Rumit, Lama, Tidak Pasti, dan Boros”

“Diidentifikasi terdapat >500 elemen data pemohon dalam layanan publik di Indonesia”



STRUKTUR SATUAN TUGAS PERPRES NO. 91 TAHUN 2017



- **SATGAS Nasional** bertanggung jawab terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan melaporkannya kepada Presiden.
- **SATGAS *Leading Sector*** wajib: (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi; (3) melaporkan kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada **SATGAS Nasional**.
- **SATGAS Provinsi, Kab/Kota** adalah SATGAS yang bertanggung jawab terhadap pelayanan perizinan berusaha yang menjadi tanggung jawabnya.
- **SATGAS Pendukung** adalah SATGAS yang memberikan dukungan untuk penyelesaian perizinan usaha sektor atau daerah.

INPUT

Nomor Akta Pengesahan Perusahaan (data AHU)



PENDAFTARAN

Login untuk akses ke OSS dan mengisi data tambahan untuk pendaftaran berusaha

01

KOMITMEN KEPATUHAN

Menyetujui untuk pemenuhan Izin Lokasi, Standar Lingkungan, Bangunan, dan SLF

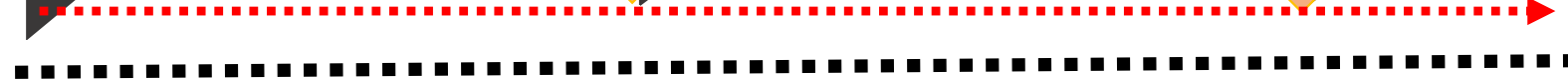
03

30 Menit

KOMITMEN KEPATUHAN

Menyetujui untuk pemenuhan Sertifikat BPJS, Standar/ Sertifikasi dan menyelesaikan izin Lainnya

05



Monitoring



OUTPUT

02

LEGALISASI PENDAFTARAN

Penerbitan NIB, BPJS Perusahaan (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), RPTKA, dan Izin Lokasi*

04

IZIN USAHA

Penerbitan Izin Usaha, Izin Lokasi** , Izin Lingkungan, dan Izin Bangunan

06

IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL

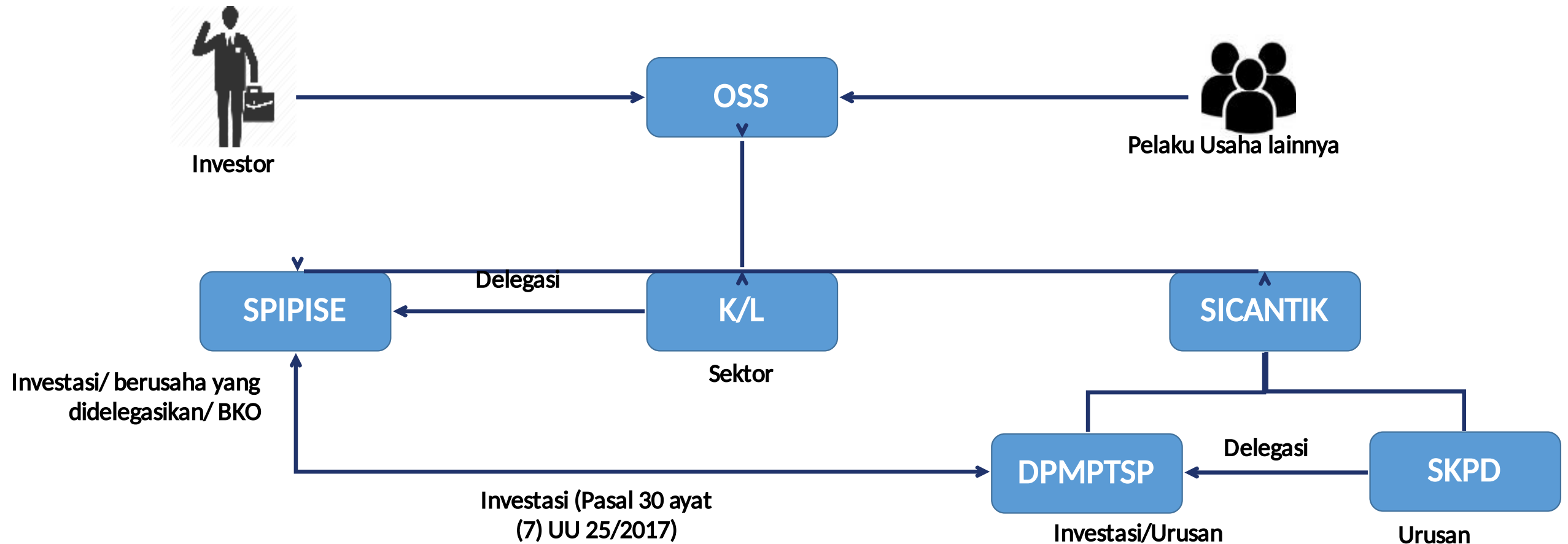
Penerbitan Izin Komersial/Sertifikasi tertentu serta Notifikasi

5 Menit

*Izin Lokasi otomatis diterbitkan OSS bagi lokasi usaha yang telah memiliki RDTR (dan peta digital), dalam kawasan, dan kondisi tertentu

** Izin Lokasi dikeluarkan OSS setelah investor/pelaku usaha membuat komitmen kepatuhan bagi tempat kegiatan berusaha di RDTR yang tidak memiliki peta digital dan yang di luar RDTR/kawasan ekonomi.

GAMBARAN PENGINTEGRASIAN SISTEM DALAM PROSES PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS







GEDUNG LAYANAN BERUSAHA
PTSP PUSAT

- [Layanan Berbantuan](#)
- [Layanan Mandiri](#)
- [Layanan Prioritas](#)

TERIMA KASIH



Tim Pelaksana SATGASNAS PERPRES 91/2017



**Tim Pelaksana
Satuan Tugas Nasional
Percepatan Pelaksanaan Berusaha**

LAMPIRAN

BADAN HUKUM/BADAN USAHA

1	Nama
2	Jenis
3	NPWP
4	Jangka Waktu
5	Alamat*
6	RT/RW*
7	Kelurahan*
8	Kecamatan*
9	Kabupaten/Kota
10	Provinsi
11	Kode Pos Perseroan*
12	Nomor Telepon Perseroan*
13	Maksud dan Tujuan (KLU)

AKTA NOTARIS

14	No. Akta
15	Tanggal Akta

MODAL DASAR

16	Klasifikasi Saham
17	Nilai Saham Perlembar
18	Jumlah Lembar Saham
19	Total Modal

MODAL DISETOR/DITEMPATKAN

20	Klasifikasi Saham
21	Nilai Saham Perlembar
22	Jumlah Lembar saham
23	Total Modal
24	Dalam bentuk uang
25	Dalam bentuk lainnya

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

26	Nama
27	Klasifikasi Saham
28	Jumlah Lembar saham
29	Jabatan
30	Total Modal

YAYASAN

31	Nama Pendiri Yayasan
32	Pengurus Yayasan

*Sejauh ini pada sistem AHU tidak mewajibkan pengisian alamat dan kontak perseroan pada saat proses pengesahan

KBLI DAN BIDANG USAHA

1	Kode KBLI 2017 (agar dikeluarkan di AHU)
2	Kegiatan Usaha Pokok

STATUS

3	Status Penanaman Modal *
---	--------------------------

NILAI RENCANA INVESTASI

4	Pembelian dan Pematangan Tanah
5	Bangunan/Gedung
6	Mesin Peralatan
7	Modal Kerja
8	Jumlah Nilai Rencana Investasi (Hasil perhitungan poin 5-8)

JENIS API

9	Jenis API (U/P)
---	-----------------

PEMEGANG SAHAM (Min 2)

10	Nama (auto input from AHU)
11	Jenis Identitas (KTP/Paspor/SK Pendirian)
12	Nomor Identitas
13	Masa Berlaku ID
14	NPWP
15	Alamat
16	Nomor Telepon
17	Fax
18	Email
19	Status Penanaman Modal
20	Negara asal

ALAMAT DAN KONTAK BADAN

21	Alamat Kantor*
22	Nomor Telepon*
23	Nomor Fax*
24	Email*

ALAMAT PROYEK

25	Alamat Proyek
26	Status Tanah Proyek
27	Luas Tanah Proyek

BPJS KETENAGAKERJAAN

28	Nama Penanggung Jawab (Pilih-Auto input dari AHU)
29	NIK

BPJS KESEHATAN

30	Nama Penanggung Jawab (Pilih-Auto input dari AHU)
31	NIK

*Mengisi data alamat dan kontak apabila tidak tercantum di dalam AHU

RPTKA

32	Nomor Surat Pengajuan
33	Jumlah TKI Laki – Laki
34	Jumlah TKI Perempuan
35	Jumlah TKA Laki – Laki
36	Jumlah TKA Perempuan
37	Jumlah Kesempatan Kerja
38	Nama Jabatan TKA
39	Jumlah TKA per Jabatan
40	Jumlah TKA
41	Jangka Waktu Penggunaan TKA
42	Gaji
43	Kab/Kota Penempatan TKA
44	Uraian Singkat per Jabatan TKA
45	Asal Negara TKA
46	Alasan Penggunaan TKA

RPTKA TKI Pendamping

47	Nama
48	Jabatan
49	Uraian Jabatan
50	NIK
51	No. Hp
52	Email
53	Foto (Auto input dari NIK)
54	Jumlah TKI Pendamping

AKSES KEPABEANAN

55	Nama Penanggung Jawab (Pilih-Auto input dari AHU)
56	NIK/No. Pasport (pilih)
57	NPWP
58	Alamat
59	No Telepon
60	Email



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1	Alas Hak
	Syarat Standar Bangunan
2	Rencana Jalan/Garis *
3	Koefisien Dasar Bangunan*
4	Koefisien Lantai Bangunan*
5	Ketinggian Bangunan*
6	Koefisien Dasar Hijau*
7	Koefisien Tapak Bangunan*
8	Tipe *
9	PSL*
	Perencanaan
10	Gambar Siteplan
11	Tes Tanah
12	Perhitungan Struktur
13	Skematik Struktur
14	Skematik Arsitektur
15	Skematik MEP

	Penanggung Jawab Pelaksanaan
16	Perencanaan Pembangunan
17	Sertifikasi Profesi Perencana
18	Badan Hukum Konsultan
19	Pelaksana Pembangunan
20	Sertifikasi Profesi Perencana
21	Badan Hukum Kontraktor
22	Pengawas Bangunan
23	Sertifikasi Profesi - Pengawas

IZIN LINGKUNGAN

24	Konsultan Penyusun AMDAL/UKL-UPL
25	Sertifikat Profesi Lingkungan Profesi Lingkungan

PRODUKSI

SNI
Tipe produk
SLVK
Jenis Barang
Varian

DISTRIBUSI/PEREDARAN

Merek
Bahasa
Kandungan bahan
Kadar nutrisi
Halal

EKSPOR

V Legal
Jenis Barang
Nomor HS
Spesifikasi Barang

IMPOR

Jenis Barang
Nomor HS
Spesifikasi Barang

BPJS KETENAGAKERJAAN PERORANGAN

BPJS KESEHATAN PERORANGAN

KARANTINA TUMBUHAN DAN HEWAN

KARANTINA PERTANIAN

KARANTINA IKAN

MASTERLIST

Jenis Barang Modal
Nomor HS Barang Modal
Kondisi Barang
Bahan Baku
Nomor HS Bahan Baku
Jumlah
Jangka Waktu



1. Status Penanaman Modal
2. Penggabungan/Merger
3. Akuisisi
4. Dilusi
5. Pemegang Saham
6. Nilai Investasi
7. Alamat Perusahaan
8. Lokasi Kegiatan Berusaha/Proyek
9. Penutupan Usaha



1. Laporan komitmen Izin Lokasi
2. Laporan komitmen Izin Lingkungan
3. Laporan komitmen IMB
4. Laporan komitmen SLF
5. Laporan komitmen Izin Usaha
6. Laporan komitmen Izin Komersial
7. Laporan realisasi investasi





1. **BANTUAN PEMANDUAN REGISTRASI DAN PERIZINAN BERUSAHA.**
2. **PENYELESAIAN PERIZINAN (KOMITMEN & COMPLIANCE).**
3. **KLINIK BERUSAHA (TENAGA KERJA, FASILITAS, STANDAR, TATA RUANG DAN KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN).**
4. **KONSULTASI PELUANG USAHA.**





